

Analisis Kebijakan Impor di Indonesia Menurut Perspektif Islam

Fathiyah Muslimah Qayyimah^{1*)}, Nurul Huda²⁾

¹Universitas Indonesia

²Universitas Yarsi

*Email korespondensi: fathiyah.muslimah@ui.ac.id

Abstract

The analysis of import policy in Indonesia from an Islamic perspective highlights the complexity of the interaction between economic aspects and religious values in the formation of public policy. In this context, it is important to consider how import policies can reflect Islamic principles that prioritize social justice, cooperation, and general welfare. The purpose of this study is to consider how import policy, as an important instrument in a country's economy, can be interpreted through an Islamic lens. This research utilizes a descriptive qualitative method. The results of this study provide an in-depth understanding of the impact of import policies on economic justice, economic self-reliance, and international cooperation, and highlight the compatibility of these policies with Islamic principles. The protection of local producers, promotion of fair international cooperation, and increased participation of Islamic scholars and economists in the decision-making process are key steps in designing a more inclusive and sustainable import policy that takes into account the interests of society.

Keywords: Import Policy, Islamic Perspective, Economics.

Saran sitasi: Qayyimah, F. M., & Huda, N. (2024). Analisis Kebijakan Impor di Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1789-1795. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13171>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13171>

1. PENDAHULUAN

Analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam menarik untuk dieksplorasi karena menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, kebijakan impor merupakan instrumen penting yang dapat memengaruhi perekonomian suatu negara secara signifikan. Pemahaman terhadap kebijakan impor dari perspektif Islam melibatkan pertimbangan etis, keadilan sosial, serta kontribusi terhadap kesejahteraan umum. Dalam paragraf berikut, akan dianalisis beberapa aspek kebijakan impor di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam (Fahrika & Roy, 2020). Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa Islam sebagai agama menyediakan pedoman etis yang komprehensif untuk berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi.

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur perilaku ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam konteks ini adalah konsep keadilan sosial atau 'adl wa ihsan',

yang menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, kebijakan impor harus dievaluasi dari sudut pandang apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Kedua, dalam konteks kebijakan impor, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi domestik, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ngatikoh & Isti'anah, 2020). Dari perspektif Islam, penting untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan produsen lokal atau menghambat kemajuan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Prinsip kemandirian ekonomi atau 'istiklal iqtisadi' menjadi relevan di sini, yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan sumber daya dan potensi ekonomi mereka sendiri sebisa mungkin sebelum mencari sumber daya dari luar. Namun demikian, Islam juga mengajarkan nilai-nilai kerjasama antarnegara dan saling membantu. Prinsip 'ta'awun' atau saling tolong-menolong merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Oleh karena itu,

kebijakan impor yang dibuat sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan domestik semata, tetapi juga memperhatikan keterkaitan dan tanggung jawab terhadap masyarakat global.

Dalam hal ini, kebijakan impor yang didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan impor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi tantangan tersendiri. Hal ini terutama karena kebijakan impor sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan kepentingan bisnis yang kompleks.

Namun demikian, upaya untuk mengintegrasikan perspektif Islam dalam pembuatan kebijakan impor dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pembentukan lembaga-lembaga konsultatif yang melibatkan ulama dan ahli ekonomi Islam, serta penyusunan regulasi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam menerapkan kebijakan impor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam mendorong para pemimpin untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusan mereka dan menjalankan otoritas mereka dengan penuh keadilan.

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan impor, penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka untuk umum dan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam kesimpulan, analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam melibatkan pertimbangan etis, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum (Fathoni, 2020). Penting untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kerjasama, dan kemandirian ekonomi. Dengan memperhatikan nilai-nilai ini, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan impor yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan ajaran Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi pilihan yang sangat relevan untuk menganalisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam. Dalam konteks ini, metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas kebijakan impor, memahami perspektif

dan pandangan berbagai pemangku kepentingan, serta menggambarkan secara rinci karakteristik kebijakan tersebut (Sulistia Wargi, 2021). Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan impor berinteraksi dengan nilai-nilai Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Langkah pertama dalam menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah mengidentifikasi fokus penelitian yang jelas. Dalam konteks analisis kebijakan impor di Indonesia menurut perspektif Islam, fokus penelitian bisa mencakup beberapa aspek. Misalnya, penelitian dapat berfokus pada evaluasi dampak kebijakan impor terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi, atau kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Setelah fokus penelitian ditentukan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam metode kualitatif deskriptif dapat dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pertama, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, ahli ekonomi, aktivis masyarakat, dan pemuka agama dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pandangan mereka terhadap kebijakan impor dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilihat dari perspektif Islam (Laili, 2021). Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa semua topik yang relevan tercakup, namun juga fleksibel untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam.

Selain itu, observasi langsung terhadap implementasi kebijakan impor, misalnya melalui kunjungan ke pelabuhan atau fasilitas pabrik, dapat memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan ekonomi riil dan masyarakat. Analisis dokumen juga menjadi komponen penting dalam pengumpulan data, dengan meneliti peraturan pemerintah, laporan perdagangan, dan dokumen kebijakan terkait untuk memahami kerangka kerja kebijakan impor dan argumen yang mendasarinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Sebuah penelitian yang menyelidiki analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam

akan menghasilkan temuan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan impor tersebut mempengaruhi masyarakat dan ekonomi Indonesia, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam (Ginting et al., 2021). Hasil penelitian ini dapat mengungkap dampak kebijakan impor terhadap keadilan ekonomi, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan umum, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan impor dapat disesuaikan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu temuan yang mungkin muncul adalah bahwa kebijakan impor di Indonesia cenderung memiliki dampak yang kompleks dan tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun kebijakan impor mungkin diadopsi dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap barang-barang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya bisa merugikan produsen lokal, terutama mereka yang bergerak di sektor-sektor yang rentan terhadap persaingan impor (Ramdani Akbar et al., 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi dalam Islam, yang mendorong pengembangan sumber daya dan potensi ekonomi domestik.

Selain itu, kebijakan impor juga dapat memiliki dampak negatif terhadap keadilan ekonomi, dengan menimbulkan disparitas antara pemilik modal dan pekerja, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam perspektif Islam, keadilan ekonomi adalah prinsip yang sangat penting, dan kebijakan impor yang tidak memperhatikan keseimbangan ini dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Misalnya, jika kebijakan impor mendukung industri besar tetapi merugikan produsen kecil dan menengah, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dalam Islam. Namun demikian, hasil penelitian juga dapat menunjukkan bahwa ada peluang untuk meningkatkan kesesuaian kebijakan impor dengan nilai-nilai Islam (Lubis & Rahmani, 2023). Salah satu rekomendasi yang mungkin dihasilkan adalah perlunya memperkuat regulasi yang mendukung produsen lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk kebutuhan dasar. Ini bisa dilakukan melalui insentif fiskal, subsidi, atau pembatasan impor untuk sektor-sektor yang dianggap vital bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian juga dapat menyoroti pentingnya kerjasama internasional yang adil dan saling menguntungkan dalam konteks kebijakan impor. Dalam perspektif Islam, prinsip ta'awun atau saling bantu-membantu antarnegara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak menyebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan di tingkat global (Nirwana et al., 2022). Dalam hal ini, Indonesia dapat memperjuangkan kebijakan impor yang didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam kerangka saling menguntungkan.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan impor dapat ditingkatkan agar lebih memperhatikan perspektif Islam. Salah satu saran yang mungkin diajukan adalah melibatkan ulama dan ahli ekonomi Islam dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan impor yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, hasil penelitian tentang analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Fika et al., 2023). Temuan-temuan ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan impor yang lebih memperhatikan nilai-nilai Islam, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan kemajuan ekonomi Indonesia.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian tentang analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antara kebijakan ekonomi, nilai-nilai agama, dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan hasil penelitian ini membuka ruang untuk merenungkan implikasi temuan tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Fi et al., 2023).

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kebijakan impor memiliki dampak yang luas terhadap

perekonomian suatu negara. Kebijakan ini mempengaruhi pasar domestik, industri lokal, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam konteks Indonesia, kebijakan impor sering menjadi topik kontroversial karena dampaknya yang beragam, baik positif maupun negatif. Dari perspektif Islam, penting untuk menilai apakah kebijakan impor tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan kerjasama internasional yang adil.

Dari hasil penelitian, kita menemukan bahwa kebijakan impor di Indonesia tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, kebijakan impor yang memberikan perlakuan preferensial kepada industri besar sering kali merugikan produsen kecil dan menengah serta berpotensi menyebabkan ketidakadilan ekonomi (Salsabilla & Puspita Sari, 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan perlunya distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat. Selain itu, ketergantungan yang terlalu besar pada impor juga dapat mengancam kemandirian ekonomi suatu negara, yang merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam.

Analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam menarik untuk dieksplorasi karena mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip, dan hukum yang terkandung dalam ajaran Islam dalam konteks ekonomi. Kebijakan impor adalah aspek penting dalam ekonomi suatu negara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan internasional. Dalam menganalisis kebijakan impor Indonesia, kita dapat meneliti aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, distribusi kekayaan, dan bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakan tersebut.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kebijakan impor adalah adilnya distribusi kekayaan. Dalam Islam, prinsip keadilan sosial sangat ditekankan. Kekayaan alam yang menjadi sumber daya untuk produksi dianggap sebagai milik bersama umat manusia. Oleh karena itu, kebijakan impor harus memperhatikan distribusi yang adil dari kekayaan alam tersebut, memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi fokus dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam Islam menekankan

pentingnya menjaga alam dan memperlakukan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks kebijakan impor, hal ini berarti Indonesia harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari barang impor yang masuk ke negara. Produk-produk yang merusak lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan harus dipertimbangkan dengan serius sebelum diperbolehkan masuk ke dalam pasar domestik. Selanjutnya, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan produsen lokal dan ekonomi umat Islam secara keseluruhan.

Dalam Islam, mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi umat Muslim merupakan hal yang dianjurkan. Oleh karena itu, kebijakan impor harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi domestik dan memastikan bahwa produsen lokal tetap dapat bersaing secara adil.

Selanjutnya, dalam hal kebijakan impor, Islam juga menekankan pentingnya perdagangan yang jujur dan transparan. Praktik-praktik korupsi, penyuapan, atau manipulasi pasar harus dihindari, dan regulasi yang adil dan transparan harus diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Selain itu, aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana kebijakan impor tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, kesejahteraan umat menjadi prioritas utama, dan kebijakan impor harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Apakah kebijakan impor tersebut akan meningkatkan aksesibilitas terhadap barang-barang penting bagi masyarakat atau malah menyebabkan peningkatan harga dan mengurangi daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, aspek etika dalam perdagangan juga harus dipertimbangkan dalam konteks kebijakan impor.

Islam mengajarkan pentingnya berbisnis dengan etika yang tinggi, menghindari eksploitasi, penipuan, atau praktik-praktik yang tidak adil. Oleh karena itu, kebijakan impor harus memastikan bahwa produk-produk yang diimpor memenuhi standar etika Islam dalam produksi dan distribusinya. Dalam kesimpulan, analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif

Islam menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip, dan hukum Islam dalam merancang kebijakan ekonomi.

Keadilan, keberlanjutan, distribusi kekayaan, perdagangan yang jujur, kesejahteraan masyarakat, dan etika perdagangan adalah beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam konteks kebijakan impor. Dengan memastikan bahwa kebijakan impor Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kita dapat membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menyoroti adanya peluang untuk meningkatkan kesesuaian kebijakan impor dengan nilai-nilai Islam. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya memperkuat perlindungan terhadap produsen lokal dan sektor-sektor yang rentan terhadap persaingan impor (Latifah et al., 2024). Ini bisa dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan seperti insentif fiskal, subsidi, atau pembatasan impor untuk sektor-sektor strategis. Langkah-langkah ini akan membantu mendorong keseimbangan yang lebih baik antara impor dan produksi domestik, serta mendukung pencapaian tujuan kemandirian ekonomi yang diadvokasi oleh Islam. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional yang adil dalam konteks kebijakan impor.

Dalam perspektif Islam, prinsip ta'awun atau saling bantu-membantu antarnegara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan global yang lebih luas (Petty & Nurul, 2024). Indonesia dapat memperjuangkan kebijakan impor yang didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam kerangka saling menguntungkan.

Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan impor terhadap ekonomi, tetapi juga tentang implikasi sosial dan budaya yang lebih luas (Yusuf & Haryono, 2022). Kebijakan impor yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dapat mengancam keberlangsungan industri tradisional dan kerajinan lokal yang sering kali terkait dengan warisan budaya dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam merancang kebijakan impor yang lebih holistik dan inklusif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembuatan kebijakan impor itu sendiri. Dengan melibatkan ulama dan ahli ekonomi Islam dalam proses pengambilan keputusan, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan impor yang dihasilkan lebih memperhatikan nilai-nilai agama dan kepentingan masyarakat secara luas (Seprianti, 2024). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan juga akan membantu memastikan bahwa kebijakan impor yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian tentang analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan impor yang lebih memperhatikan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan kerjasama internasional yang adil, serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Salsabila et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tentang analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam menggambarkan kompleksitas hubungan antara kebijakan ekonomi, nilai-nilai agama, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak kebijakan impor terhadap keadilan ekonomi, kemandirian ekonomi, dan kerjasama internasional, serta menyoroti kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan impor benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Islam, namun penelitian juga mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kesesuaian kebijakan impor dengan prinsip-prinsip agama. Perlindungan terhadap produsen lokal, promosi kerjasama internasional yang adil, serta peningkatan partisipasi ulama dan ahli ekonomi Islam dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah-langkah kunci dalam merancang kebijakan impor yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan

lainnya dapat memperjuangkan kebijakan impor yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya.

Analisis kebijakan impor di Indonesia dari perspektif Islam menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Dalam konteks kebijakan impor, aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, distribusi kekayaan, perdagangan yang jujur, kesejahteraan masyarakat, dan etika perdagangan sangat penting untuk dipertimbangkan. Pertama-tama, kebijakan impor harus memperhatikan aspek keadilan dalam distribusi kekayaan. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah milik bersama umat manusia, dan kekayaan alam harus didistribusikan secara adil sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan impor harus memastikan bahwa distribusi kekayaan alam yang berasal dari barang impor tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, keberlanjutan juga menjadi fokus penting dalam analisis kebijakan impor dari perspektif Islam.

Prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam Islam menekankan pentingnya menjaga alam dan memperlakukan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan impor harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari barang impor yang masuk ke negara. Produk-produk yang merusak lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan harus ditangani dengan serius untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan ekosistem dan keseimbangan alam. Selanjutnya, kebijakan impor harus memperhatikan dampaknya terhadap produsen lokal dan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Islam mendorong untuk mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi umat Muslim.

Kebijakan impor harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi domestik dan memastikan bahwa produsen lokal tetap dapat bersaing secara adil dalam pasar global. Selain itu, kejujuran dan transparansi dalam perdagangan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan impor. Islam menekankan pentingnya perdagangan yang jujur dan

adil, serta menghindari praktik-praktik korupsi atau manipulasi pasar.

Oleh karena itu, kebijakan impor harus didasarkan pada regulasi yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Selanjutnya, kebijakan impor harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas utama, dan kebijakan impor harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap aksesibilitas terhadap barang-barang penting bagi masyarakat serta daya beli mereka. Kebijakan impor yang menguntungkan hanya segelintir pihak atau menyebabkan peningkatan harga yang merugikan masyarakat harus dihindari.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, penulis menyadari seutuhnya bahwa begitu banyak individu yang terlibat dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis akan selalu mensyukuri nikmat yang datang dari segala bentuk bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang-orang berikut: 1) Kedua orang tua, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang. 2) Prof. Dr. Nurul Huda selaku dosen tetap Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. 3) Seluruh dosen dan staf pengajar pada program studi Kajian Timur Tengah dan Islam peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, yang telah membantu dan menginformasikan kepada penulis. 4) Kepada rekanrekan seperjuangan, kami ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk pencapaian akademik selanjutnya.

6. REFERENSI

- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). *Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh*. 2, 206–213. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVA_SI
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>

- Fi, S., 1*, S., Lubis, F. A., & Tambunan, K. (2023). *Analisis daya saing nilai ekspor udang beku halal food indonesia ke 5 negara tujuan ekspor dalam perspektif Islam*.
- Fika, N., Fauzi, A., Qurtubi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman, J. N., Cipocok Jaya Kec Serang, P., & Serang, K. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH TERHADAP SETIAP WARGA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. In *Jurnal Ilmiah METADATA* (Vol. 3).
- Laili, N. (2021). ANALISIS DAYA SAING DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR PRODUK ALAS KAKI INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2385>
- Latifah, L. L., Universitas, S. R., & Soedirman, J. (2024). *Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia*. 5, 1523.
- Lubis, R. A., & Rahmani, N. A. B. (2023). PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, HARGA KOPI INTERNASIONAL TERHADAP NILAI EKSPOR KOPI INDONESIA DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PERIODE 2002-2021. *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 11(2), 135–152. <https://doi.org/10.26740/jepk.v11n2.p135-152>
- Ngatikoh, S., & Isti'annah, D. (2020). PENGARUH EKSPOR IMPOR BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Nirwana, K. P., Sakir, S., & Sutan, A. J. (2022). Analisis Kebijakan BLT Dan Desa dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada Sektor Desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 137–150. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.15135>
- Petty Christin Mahgaraini, & Nurul Cahya Arsita. (2024). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Cadangan Devisa Negara Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam Periode Triwulan I-III 2023. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 154–165. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2668>
- Ramdani Akbar, R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., Sjech, U., Djamil, M., & Bukittinggi, D. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Salsabila, M., Hasanah, F., Amalia, R., Rahmah, F., Ekonomi, F., Islam, B., Syariah, E., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Jl, S. H. A. M., Rifaddin, H., Baru, K., Loa, J., Ilir, K., Samarinda, K., & Timur, I. (2024). Bagaimana Pengaruh dari Kebijakan Pemerintah Dalam Mengendalikan Impor Terhadap Penurunan Tingkat Inflasi di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(1), 76–83. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i1.4702>
- Salsabilla Denura, J., & Puspita Sari, V. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 212–227. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.33468>
- Seprianti, V. D. (2024). Analisis Kebijakan Moneter melalui Jalur Harga Aset di Negara Muslim Berkembang. *Economic Reviews Journal*, 3, 609–623. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.174>
- Sulistia Wargi. (2021). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA JOKOWI MELALUI DIPLOMASI EKONOMI DALAM UPAYA UNTUK MENGUASAI PASAR HALAL DUNIA. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 320–341. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.228>
- Yusuf, R., & Haryono, H. (2022). Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Pemerintah Terhadap Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2285>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>